LAPORAN KINERJA

(L K J)

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH

TAHUN 2020

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TAHUN 2021

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh Tahun 2020 dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh BPSDM Aceh.
2. Mendorong BPSDM Aceh di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPSDM Aceh untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap BPSDM Aceh di dalam pelaksanaan/program dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

BPSDM Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPSDM Aceh.

BPSDM merupakan unsur pelaksanan penyelenggaran pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Unsur organisasi BPSDM Aceh terdiri dari;
   a. Pimpinan : Kepala
   b. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari subbagian-subbagian
   c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari seksi-Seksi
      - UPT; dan
      - Kelompok jabatan Fungsional
2. Organisasi BPSDM Aceh terdiri dari:
   a. Kepala
   b. Sekretariat, terdiri dari:
      1. Subbagian Kepegawaian dan Umum :
      2. Subbagian Keuangan; dan
      3. Subbagian Program dan Pelaporan
   c. Bidang Pengembangan SDM dan Kerjasama, terdiri dari
      1. Sub Bidang Perencanaan, Kerjasama dan pendayagunaan alumni;
      2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur; dan
      3. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Non-Aparatur.
   d. Bidang Pengembangan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Inti, terdiri dari :
      1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti dan Jabatan Administrasi Urusan Pemerintahan Wajib dan pilihan;

2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Dan Khusus/Istimewa; dan
3. Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi.

e. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural
1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum Pimpinan dan Prajabatan; dan
3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional.

f. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural
1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan daerah dan Jabatan Pimpinan tinggi;
2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan; dan
3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Manajerial Pola Kemitraan.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh

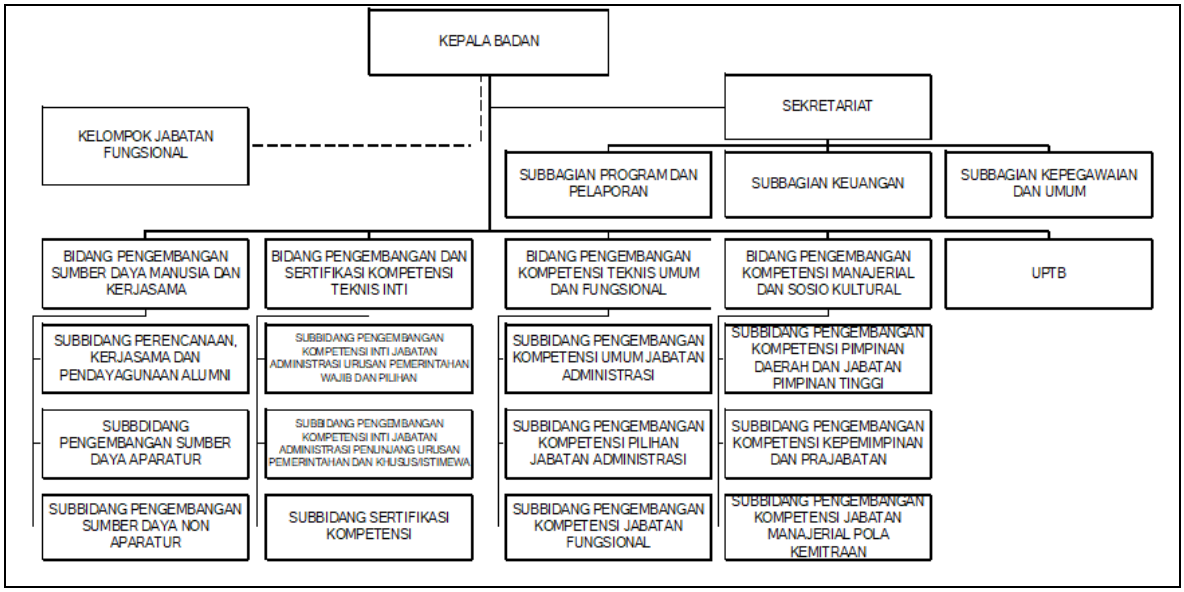

Sumber : BPSDM, 2020

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPSDM Aceh menjelaskan bahwa Tugas pokok BPSDM Aceh adalah menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan daerah dibidang pengembangan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur Aceh, baik Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pokok tersebut, BPSDM Aceh mempunyai fungsi :

1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia provinsi;
2) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
3) Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di provinsi dan kabupaten kota;
5) Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Provinsi;
6) Pembinaan UPTB; dan
7) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengembangan sumber daya manusia Aceh.

1.3 Aspek Strategis

Perumusan strategi pembangunan didasarkan pada kerangka analisis terhadap faktor lingkungan strategis. Proses perumusan strategi perlu dilakukan mengingat faktor strategis lingkungan akan menentukan keberhasilan pelaksanaan visi dan misi yang ditetapkan. Keberadaan

faktor-faktor lingkungan strategis yang dimaksud terdiri dari faktor lingkungan internal strategis dan faktor lingkungan eksternal strategis yang merupakan kerangka dasar, mengingat pada faktor tersebut dapat ditemukan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Visi dan misi Pemerintah Aceh untuk periode RPJM 2017-2022 diwujudkan melalui pelaksanaan 15 (lima belas) unggulan Aceh Hebat yaitu:

1. Aceh *Peumulia*, pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan liar (pungli);
2. Aceh *Meuadab*, mengembalikan khittah Aceh sebagai Serambi Mekkah melalui implementasi nilai-nilai ke-Islam-an dalam kehidupan sehari-hari;
3. Aceh *Dame*, penguatan pelaksanaan UUPA sesuai prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif;
4. Aceh *Carong*, pelaksanaan beberapa kegiatan penguatan keterampilan bagi generasi muda melalui pendidikan vokasional baik formal maupun informal;
5. Aceh *Teuga*, mengembalikan dan meningkatkan prestasi olahraga Aceh di tingkat nasional dan regional;
6. Aceh *Seujahtra*, pemenuhan akses layanan kesehatan gratis yang lebih mudah, berkualitas dan terintegrasi melalui Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) Plus;
7. Aceh *Seuninya*, penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin secara bertahap;
8. Aceh *Meugoe* dan *Meulaot*, melaksanakan pembangunan pertanian dan ekonomi maritim melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi;
9. Aceh *Troe*, pemenuhan pangan dan gizi bagi seluruh rakyat Aceh secara mandiri;
10. Aceh *Energi*, pemenuhan energi listrik bagi rakyat Aceh dan industri yang berasal dari energi bersih-terbarukan;

11. Aceh *Kreatif*, mendorong tumbuhnya industri sesuai dengan potensi sumber daya daerah dan memproteksi produk yang dihasilkannya;
12. Aceh *Kaya*, merangsang tumbuhnya *entrepreneur* yang ditunjang dengan kemudahan akses terhadap modal, keterampilan dan pasar;
13. Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu), merupakan pengembangan sistem informasi dan database Aceh yang terpadu untuk dapat digunakan semua sektor pembangunan dan pelayanan;
14. Aceh *Green*, penegasan terhadap pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif terhadap resiko bencana alam;
15. Aceh *Seumeugot*, diharapakan dapat tersedianya sarana dan prasarana (infrastruktur) secara cerdas dan berkelanjutan serta terintegrasi untuk menjadi daya ungkit pembangunan ekonomi.

Dari kelima belas unggulan Aceh Hebat tersebut, BPSDM Aceh melaksanakan upaya untuk mewujudkan prioritas yang pertama yaitu *Aceh Peumulia* melalui penyediaan layanan pemerintahan yang mudah, cepat dan berkualitas terutama pada penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi SDM aparatur Aceh. Serta memprioritas misi keempat yaitu Aceh *Carong* melalui pengiriman putra-putri terbaik Aceh untuk mendapatkan pendidikan di universitas-universitas yang bergengsi di tingkat internasional dan memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan ke depan saat kembali ke Aceh.

1.4 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang ada sampai saat ini pada BPSDM Aceh adalah sebanyak 112 orang, dimana 89 orang adalah PNS, 23 orang fungsional widyaiswara. Pegawai non PNS sebanyak dan 75 orang. Komposisi keadaan pegawai dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pendidikan Formal

Komposisi keadaan pegawai negeri sipil (PNS dan Widyaiswara) berdasarkan pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawa Negeri Sipil (PNS Dan Tenaga Kontrak) Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	PNS	Tenaga Kontrak	Jumlah (orang)
1	S – 3	3		3
2	S – 2	56	2	58
3	S – 1	45	22	67
4	D – 3	2	5	7
5	D – 4			
6	SLTA / Sederajat	6	41	47
7	SLTP		1	1
8	SD		4	4
Jumlah		**112**	**75**	**187**

Sumber : Subbag. Kepegawaian dan Umum BPSDM Aceh (keadaan s.d 01 Desember 2020)

2. Berdasarkan Golongan Ruang

1. Komposisi PNS Struktural berdasarkan Golongan Ruang

Tabel 1.2

No.	Golongan Ruang	Jumlah (orang)
1	IV/e	
2	IV/d	
3	IV/c	1
4	IV/b	11

5	IV/a	10
6	III/d	16
7	III/c	13
8	III/b	23
9	III/a	6
10	II/d	4
11	II/c	1
12	II/b	
13	II/a	
J u m l a h		**85**

Sumber : Subbag Kepegawaian dan Umum BPSDM Aceh (keadaan s.d 01 Desember 2020)

2. Komposisi PNS Fungsional Widyaiswara berdasarkan Golongan Ruang

Tabel 1.3

No.	Golongan Ruang	Jumlah (orang)
1	IV	18
2	III	5
J u m l a h		**23**

Sumber : Subbag Kepegawaian dan Umum BPSDM Aceh (keadaan s.d 01 Desember 2020)

1.5 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mewujudkan BPSDM Aceh yang profesional dan unggul dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, didukung dengan memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

a. Sarana

1) 17 buah *white board*
2) 34 buah *flip chart*
3) 28 buah OHP/LCD
4) 34 unit laptop
5) 123 unit komputer
6) 9 Set Sound System dan Loudspeaker
7) 14 unit mobil
8) 4 unit motor
9) 6 unit mesin absen elektrik
10) 189 unit *Air Conditioner* (AC) split/AC Standing
11) 40 unit TV LCD
12) 3 unit mesin fax
13) 2 unit mesin *fotocopy*
14) 10 unit Acces Point

b. Prasarana

1) 13 ruang Belajar yang dilengkapi dengan AC
2) 1 Gedung Auditorium BPSDM Aceh dengan kapasitas 600 orang lengkap dengan *audio system*
3) 2 asrama diklat dengan kapasitas 80 kamar yang dapat menampung 160 orang peserta diklat
4) 1 tempat ibadah (mushalla)
5) 1 ruang rapat

6) 1 aula yang dapat menampung 200 orang peserta
7) 1 *guest house* dengan kapasitas 6 kamar
8) 1 laboratorium bahasa dengan kapasitas 20 orang peserta
9) 1 ruang perpustakaan dengan fasilitas koneksi internet
10) 1 ruang makan dengan kapasitas 100 orang peserta diklat
11) 1 ruang kebugaran (*fitness center*)
12) 1 ruang dapur
13) Tempat parkir luas
14) 1 Lapangan Tenis/Voly
15) 1 Klinik Kesehatan Peserta Diklat
16) 1 Gedung Widyaiswara
17) 1 Lab Komputer

1.6 Keuangan

Pada tahun anggaran 2020 BPSDM melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 99.180.208.498**,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung **Rp. 16,709,614,730.00,-** dan Belanja Langsung **Rp. 82.470.593.768,-.** Total realisasi ialah **Rp. 88.906.420.072,- (90,69%)** dengan rincian yaitu untuk Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 15.420.420.840,- (92,28%)** dan realisasi Belanja Langsung sebesar **Rp. 73.485.999.232,- (89,11%).**

Realisasi pendapatan asli daerah yang diperoleh dari BPSDM Aceh yang didapat dari 3 sektor yaitu penyelenggaraan pelayanan pendidikan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat penginapan. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan mencakup kontribusi terhadap pelayanan diklat PIM dan Prajabatan dari kab/kota. Retribusi pemakaian kekayaan daerah mencakup penyewaan ruang aula baik besar maupun kecil, ruang kelas serta ruang makan. Terakhir, pendapatan asli daerah yang diperoleh BPSDM juga didapat retribusi tempat penginapan atau asrama BPSDM yang biasa disewakan bagi penyelenggaran diklat. Total

penerimaan sebesar **Rp. 345.100.000,- (51,53%)** atau belum mencapai dari target **Rp. 9.966.636.000,-** yang ditetapkan.

Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh selama Tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi BPSDM Aceh

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2020.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja,

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV – Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja BPSDM Aceh serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, didalam perencanaan terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan organisasi, membuat stategi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi. Unsur perencanaan tersebut meliputi :

2.1.1 Visi dan Misi

2.1.1.1 Visi

Maksud dari perumusan visi-misi adalah tersedianya sebuah dokumen yang menggambarkan kondisi masa depan provinsi Aceh pada tahun 2017 - 2022 yang hendak diwujudkan oleh Gubernur Aceh serta upaya-upaya yang akan ditempuh oleh Gubernur Aceh dalam mewujudkannya. Tujuan dari perumusan Visi dan Misi ini adalah tersosialisasikannya tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dan arah kebijakan serta program prioritas yang akan dijalankan untuk mencapainya. Visi Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022 adalah

“Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani ”

2.1.1.2 Misi

Adapun Misi pembangunan Pemerintah Aceh yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia sesuai RPJMA (2017-2022) adalah reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani, serta membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional. Misi ini pelaksanaannya dapat dijabarkan dalam misi BPSDM Aceh, yaitu:

1. Memberikan pelayanan pendidikan dan kediklatan baik kepada masyarakat maupun ASN dengan mudah, cepat dan berkualitas serta bebas dari pungutan.
2. Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan agar aparatur yang ditempat sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
3. Peningkatan sarana dan prasarana kediklatan untuk peningkatan pelayanan kepada ASN dan Masyarakat
4. Meningkatkan kompetensi SDM agar putra-putri Aceh dapat bersaing ditingkat nasional dan international.
5. Terwujudnya SDM yang berkompeten serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan Aceh.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

2.1.2.1 Tujuan

Mengacu pada visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah BPSDM Aceh selama 5 tahun anggaran sesuai dengan dokumen RPJMA adalah :

1. Terwujudnya profesionalisme pemerintahan yang didukung oleh aparatur yang kompeten.

2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten.

2.1.2.2 Sasaran

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi, ditetapkan beberapa sasaran beserta indikatornya yang merupakan penjabaran secara terukur dari tujuan-tujuan yang telah diwujudkan sampai tahun 2022. Penjabaran ini dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran tentang sesuatu yang akan dicapai, BPSDM Aceh memiliki sasaran yaitu:

a. Menciptakan Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dalam memberikan pelayanan publik; dan
b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Non Aparatur yang handal dan memiliki daya saing yang tinggi.

2.1.3 Strategi

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

2.1.3.1 Misi 1

Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani;

2.1.3.2 Misi 2

Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum;

Berikut merupakan tabel penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang tetapkan dalam Laporan Kinerja :

No	Strategi	Kebijakan	No	Program	Kegiatan
1.	Peningkatan kualitas kelembagaan diklat yang mencakup aspek-aspek kelembagaan dan aspek ketatalaksanaan dan koordinasi	Peningkatan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan koordinasi melalui pemenuhan akan fasilitas diklat yang menunjang pelaksaan diklat.	1.	Program Pelayanan administrasi perkantoran kegiatan	1. Penyediaan jasa surat menyurat
					2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
					3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
					4. Penyediaan alat tulis kantor
					5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
					6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
					7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
					8. Penyediaan peralatan rumah tangga
					9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
					10. Penyediaan makanan dan minuman
					11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
					12. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

					13.Pembangunan gedung kantor
					14. Pengadaan Kenderaan dinas/operasional
					15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
					16.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
					17.Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor
					18.Pemeliharaan rutin/berkala Taman tempat parkir dan halaman kantor
					19.Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Air Minum
					20.Kegiatan Pembinaan Kelembagaan
					21.Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
					22.Rapat koordinasi BPSDM

					23.Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
			2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan	1. Pembangunan gedung kantor
					2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
					3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
					4. Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional
					5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
					6. Pemeliharaan rutin/berkala taman tempat parkir dan halaman kantor
					6.Pemeliharaan rutin/berkala jaringan air minum
					7.Kegiatan pembinaan kelembagaan
			3.	Program peningkatan disiplin aparatur	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

2.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat	Pemenuhan akan fasilitas diklat yang menunjang pelaksanaan diklat termasuk tenaga pengelola diklat dan program-program kediklatan.	1.	Program Peningkatan kualitas sumber daya aparatur kegiatan	1. Rapat koordinasi BPSDM
					2. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah
					3.Pendidikan dan pelatihan bagi pejabat strategis, pimpinan tinggi dan pimpinan daerah
					4.Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS daerah
			2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya manusia Aceh	1. Beasiswa bagi masyarakat Aceh
					2.Beasiswa tugas belajar Aparatur pemerintah Aceh
					3. Bantuan izin belajar aparatur pemerintah Aceh
					4.Pelatihan Bahasa asing
					5.Kerjasama, Monitoring dan evaluasi Beasiswa

4	Konsistensi terhadap sertifikasi kompetensi	Pemenuhan akan penilaian terhadap sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan		Program pendidikan kedinasan	1.Pendidikan dan Pelatihan Teknis
					2.Pendidikan dan Pelatihan Teknis Inti
					3.Pendidikan dan Penjengjangan Struktural
					4.Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Profesionalisme Pemerintahan yang di dukung oleh Aparatur Yang berkompeten	Menciptakan Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dalam memberikan pelayanan publik	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Diklat	20%	40%	55%	67%	87%
			Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Diklat	20%	35%	45%	60%	75%
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat	75%	78%	84%	87%	89%
			Peningkatan Kerjasama Jejaring Kerja	30%	35%	44%	48%	50%

			Pengelolaan sistem Informasi Kediklatan	45%	50%	52%	55%	60%
			Konsisten Terhadap Sertifikasi Kompetensi	33%	34%	38%	40%	45%
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Non Aparatur yang handal dan memiliki daya saing tinggi	Penyaluran beasiswa masyarakat aceh tepat sasaran	25%	27%	33%	35%	40%

Dari Penjabaran kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam bentuk program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran. Secara keseluruhan pada tahun 2020 BPSDM Aceh memiliki 6 program dan 34 kegiatan yaitu:

Program :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
d. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

e. Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
f. Program Pendidikan Kedinasan

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Peyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8. Penyediaan peralatan rumah tangga
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
13. Pembangunan gedung kantor
14. Pengadaan Kenderaan dinas/operasional
15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
16. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
17. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor
18. Pemeliharaan rutin/berkala Taman tempat parkir dan halaman kantor
19. Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Air Minum
20. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan
21. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
22. Rapat koordinasi BPSDM
23. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

24. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pejabat Strategis, Pimpinan Daerah
25. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS daerah
26. Beasiswa bagi Masyarakat Aceh
27. Beasiswa Tugas Belajar Aparatur Pemerintah Aceh
28. Bantuan Izin Belajar Aparatur Pemerintah Aceh
29. Pelatihan Bahasa Asing
30. Kerjasama, Monitoring dan Evaluasi Beasiswa
31. Pendidikan dan pelatihan teknis
32. Pendidikan dan pelatihan teknis Inti
33. Pendidikan dan penjenjangan structural
34. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mendefinisikan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas serta mandat (*Core Business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Indikator Kinerja digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Kedua terminologi tersebut merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada Tahun 2020 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh telah menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

a. Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai eselon;
b. Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan minimal 20 JP pertahun;
c. Persentase ASN yang mengambil tugas belajar sesuai kebutuhan instansi;
d. Persentase CPNS yang telah mengikuti diklat prajabatan
e. Persentase peningkatan Putra/Putri Aceh yang mendapat beasiswa IKU BPSDM Aceh 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	
1	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR	PERSENTASE PEJABAT STRUKTURAL YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT KEPEMIMPINAN SESUAI ESELON	JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT KEPEMIMPINAN/JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL YG WAJIB MENGIKUTI DIKLAT KEPEMIMPINAN X 100 %		DATA PRIMER BPSDM/SKPD	
		PERSENTASE ASN YANG TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MINIMAL 20 JP PER TAHUN	JUMLAH PESERTA YANG TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MINIMAL 20 JP PER TAHUN/25 % JUMLAH ASN X 100%	PESERTA DIKLAT TEKNIS, DIKLAT TEKNIS INTI ,DIKLAT FUNGSIONAL	DATA PRIMER BPSDM/SKPD	
		PERSENTASE ASN YANG MENGAMBIL TUGAS BELAJAR SESUAI KEBUTUHAN INSTANSI	JUMLAH ASN YANG MENGAMBIL TUGAS BELAJAR/JUMLAH KEBUTUHAN TENAGA KADER PNS X 100 %		DATA PRIMER BPSDM/SKPD	
		PERSENTASE CPNS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT PRAJABATAN	JUMLAH CPNS YANG MENGIKUTI DIKLAT PRAJABATAN/JUMLAH CPNS X 100%	PESERTA DIKLAT PRAJABATAN	DATA PRIMER BPSDM/SKPD	
2	PENINGKATAN JUMLAH MAHASISWA PUTRA/PUTRI ACEH YANG MENDAPAT BEASISWA	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PUTRA/PUTRI ACEH YANG MENDAPAT BEASISWA	JUMLAH PUTRA/PUTRI ACEH YANG MENDAPAT BEASISWA/JUMLAH MAHASISWA TAHUN LALU X 100%	MAHASISWA PUTRA/PUTRI ACEH YANG MENDAPAT BEASISWA	DATA PRIMER BPSDM, LPSDM, PERGURUAN TINGGI	

BANDA ACEH, 16 Juli 2018
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA ACEH

Dr. Mahyuzar, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19681016 199503 1 003

2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan pencapaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja (LKj) dan menilai keberhasilan organisasi pada setiap akhir tahun anggaran, Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja.

Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*). Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*performance accountability report*). Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, pada tahun 2020 ditetapkan beberapa sasaran terpilih yang dijabarkan dalam indikator dan program yang dicapai serta dilaksanakan pada tahun 2020. Hal ini terlihat pada lampiran 1, sasaran strategis terpilih yang akan dicapai pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja BPSDM 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya	1. Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Teknis Umum	90 Orang

	Aparatur	2. Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis Inti	120 Orang
		3. Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis Penjenjangan Struktural	21 Orang
		4. Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan	60 Orang
		5. Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional	30 Orang
		6. Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Profesionalisme	110 Orang
		7 Jumlah Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Izin belajar Bagi ASN	28 Orang
2	Meningkatkan Pengembangan Kapasitas Sumber daya Manusia Non Aparatur	1. Jumlah Putra/putri Aceh yang Mendapat Bantuan Beasiswa	1.430 Orang

2.3.1 Rencana Anggaran Tahun 2020

Pada tahun anggaran 2020 BPSDM melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp.99.180.208.498,** dengan rincian Belanja Tidak

Langsung **Rp.16.709.614.730,-** dan Belanja Langsung **Rp.82.470.593.768,-.**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

BPSDM Aceh telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja BPSDM Aceh tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria penilaian realisasi kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Baik
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51%≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

*Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPSDM dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. pengukuran kinerja ini juga mencakup indikator kinerja utama yang telah ditandatangani oleh kepala BPSDM. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPSDM beserta target dan pencapaian realisasinya sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur	1 Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai eselon	Orang	39	36	92.3%	Sangat Baik
		2 Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan minimal 20 JP pertahun	Orang				
		3 Persentase ASN yang mengambil tugas belajar sesuai	Orang	390	314	80.5	Tinggi

		kebutuhan instansi					
		4 Persentase CPNS yang telah mengikuti diklat prajabatan	Orang	60	55	91.6%	Sangat Baik
2	Meningkatkan Pengembangan Kapasitas Sumber daya Manusia Non Aparatur	1 Persentase peningkatan Putra/Putri Aceh yang mendapat beasiswa	Orang	1430	1376	96.2%	Sangat Baik

Secara umum kinerja BPSDM Aceh dikategorikan sangat baik, karena pencapaian terhadap perjanjian kinerja yang telah ditetapkan mencapai 90.1% (sangat baik), karena menunjukkan bahwa semakin besar realisasi menunjukkan kinerja semakin baik dan jika semakin kecil realiasi maka kinerja semakin buruk. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dalam pembahasan evaluasi selanjutnya.

3.2 Evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis

3.2.1 Sasaran I : Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur

Sasaran strategis ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya aparatur merupakan aspek penting bagi BPSDM Aceh dalam menjadi tolok ukur kinerja. Diperlukan suatu langkah pengembangan kompetensi yang efektif, efisien, terukur dan terarah serta berinovasi. Hal ini dilakukan agar dapat terwujudnya pengembangan kompetensi sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan instansi di lingkungan Pemerintah Aceh maupun di tingkat kabupaten/kota. Pelaksanaan pengembangan kompetensi adalah salah satu unsur penting dalam pengelolaan SDM ASN dan merupakan cara efektif untuk meningkatkan kinerja aparatur. Fokus pengembangan kompetensi ini terletak pada partisipasi ASN untuk mengikuti diklat, pengembangan kompetensi pengelola kediklatan, sertifikasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan instansi dan pemberian bantuan dalam rangka pengembangan SDM yang diberikan bagi ASN melalui bantuan tugas belajar dan izin belajar.

Tolak ukur capaian sasaran ini terdiri dari 7 (tujuh) indikator yaitu:

(1) Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis umum;
(2) Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis inti;
(3) Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis penjenjangan struktural;
(4) Jumlah ASN yang mengikuti diklat prajabatan;
(5) Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional;
(6) Jumlah ASN yang mengikuti Diklat profesionalisme;
(7) Jumlah pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas bagi ASN.

Tabel 3.3

Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2019 Terhadap Target Akhir Rentra (Persen)
			Target	Realisasi	Persentase		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Teknis Umum	90 orang	22 orang	24.4%	72%	96.4%
		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis Inti	120 orang	90 orang	75%	80%	150%
		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis Penjenjangan Struktural	21 orang	11 orang	52%	76%	128%

		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan	60 orang	55 Orang	91.6%	75%	166.6%
		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional	30 orang	20 orang	66.6%	50%	116.6%
		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Profesionalisme	28 orang	15 orang	53.5%	74%	127.5%
		Jumlah Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi ASN	390 orang	314 orang	80.5%	72%	152.5%
2	Meningkatkan Pengembangan Kapasitas Sumber daya Manusia Non Aparatur	Jumlah Putra/putri Aceh yang Mendapat Bantuan Beasiswa	1.430 orang	1.376 orang	96.2%	66%	162.2%

Indikator : Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis umum

Pada tahun 2020 BPSDM Aceh mengadakan kegiatan diklat teknis umum yang mencakup diklat yaitu;

i. Program Pelatihan Bahasa Inggris / English Language Course (ELC) Tahun 2020

Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) ini menjadi hal yang tidak bisa ditawar dalam menghadapi MEA dan era globalisasi. Memasuki perputaran era globalisasi semakin menuntu sumber daya manusia untuk semakin terampil menghadapi segala perkembangan dan persaingan maka dari itu hanya individu yang kreatif dan punya skill di bidangnya yang dapat memenangkan persaingan di era globalisasi.

Di era persaingan dan globalisasi, kemahiran Bahasa Asing sangat dibutuhkan untuk peningkatan kemampuan SDM, terutama untuk peningkatan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di tingkat S2 maupun S3. BPSDM Aceh sebagai lembaga pemerintahan yang mengemban misi pengembangan Sumber Daya Manusia melalui program Aceh Carong mengadakan program Pelatihan Bahasa Inggris / English Language Course (ELC) untuk meningkatkan kemampuan berbahasa.

Disisi lain kesempatan untuk mendapatkan beasiswa belajar ke luar negeri kini terbuka lebar bagi warga negara Indonesia. Pada umumnya pelamar beasiswa diharapkan mampu menunjukkan tingkat kemampuannya dalam berbahasa asing dengan mengikuti tes Bahasa Asing yang diakui secara internasional, seperti IELTS/TOEFL, HSK atau TOAFL.

BPSDM melalui program-program pengembangan sumber daya manusia Aceh berusaha untuk meningkatkan kemampuan Putra-Putri Aceh untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi maupun untuk tujuan mendapatkan pekerjaan. Selain

kemampuan finansial yang selama ini didukung oleh program beasiswa, BPSDM Aceh juga memberikan pelatihan yang diharapkan mampu menjembatani gap kompetensi dalam penguasaan bahasa asing dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Pelatihan Bahasa Inggris / English Language Course (ELC) ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa dalam kesempatan ini Bahasa Inggris sebagai salah satu syarat dalam melamar beasiswa dan persyaratan masuk universitas tinggi terkemuka dunia. Untuk itu BPSDM Aceh bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait di Aceh yaitu lembaga bahasa Universitas Syiah Kuala, wadah alumni LPDP (Mata Garuda) dan KIES Aceh. Di akhir program ini diharapkan peserta memiliki kemampuan berbahasa asing yang baik sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang diiinginkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilaksanakannya Pelatihan Bahasa Inggris / English Language Course (ELC) Tahun 2020

Adapun Pelaksanaan Program Pelatihan Bahasa Inggris English Language Course (ELC) Tahun 2020 bertujuan:

1. Meningkatkan keterampilan Bahasa Inggris.
2. Membantu putra-putri Aceh untuk memahami dan mengikuti proses seleksi beasiswa dalam dan luar negeri dan proses aplikasi masuk ke universitas dari berbagai negara.
3. Mengenal dan memahami kebudayaan di negara-negara yang menjadi tempat tujuan belajar dan kebudayaan Aceh sendiri.

Para peserta yang mengikuti Pelatihan Bahasa Inggris / English Language Course (ELC) Tahun 2020 adalah Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur yang berasal dari Provinsi Aceh dengan target grup sebanyak 22 (dua puluh dua) orang peserta, dan seluruh peserta telah mengikuti seluruh program pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

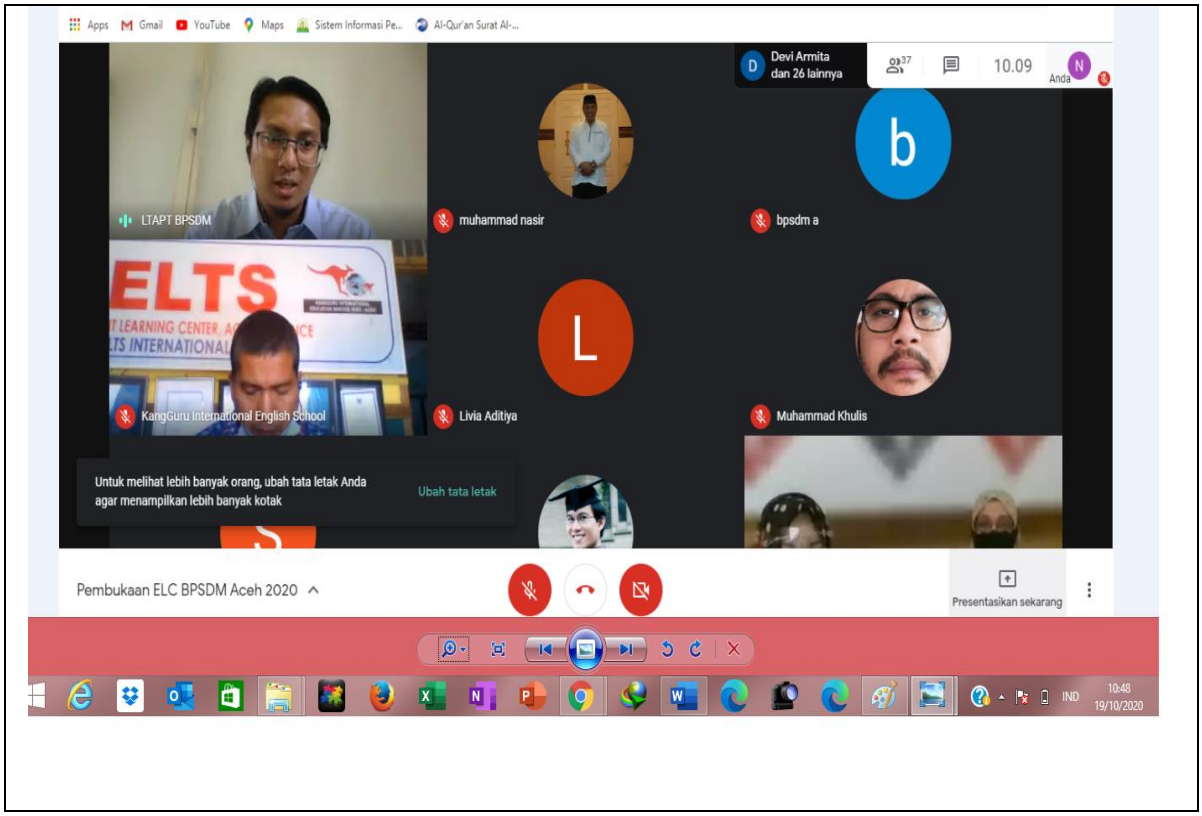

Gambar 1.1
Program Pelatihan Bahasa Inggris / English Language Course (ELC) Tahun 2020

ii. Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional

Diklat Penghitungan Angka Kredit (PAK) Kependidikan Tahun 2020

Guru merupakan pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Guru mempunyai peran sebagai agen pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Tenaga Kependidikan merupakan ujung tombak upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia melalui perannya dalam proses pembelajaran. Pendidik yang berkualitas akan menghasilkan anak didik yang berkualitas pula. Oleh karena itu kompetensi pendidik harus terus menerus dikembangkan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Peningkatan karir Tenaga Kependidikan ditentukan oleh perolehan angka kredit dalam kurun waktu tertentu. Kegiatan-kegiatan yang diperhitungkan dalam perolehan angka kredit diantaranya adalah peningkatan kualifikasi melalui pendidikan formal, melaksanakan proses pembelajaran dan pembimbingan, pengembangan keprofesian berkelanjutan dan kegiatan penunjang lainnya. Pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat dilakukan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif.

Petunjuk teknis dalam penilaian angka kredit Tenaga Kependidikan ini telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2009 terkait dengan Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya serta disebutkan bahwa untuk kenaikan pangkat seorang guru harus memenuhi kriteria angka kredit kumulatif minimal dan angka kredit tiap jenjangnya

Adapun tujuan diselenggarakan Diklat Penghitungan Angka Kredit (PAK) Kependidikan Tahun 2020 ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan pemahaman kebijakan Pemerintah terkait Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan dan Angka Kreditnya serta meningkatkan kompetensi dan kemampuan bagi Tenaga Pendidik dalam melakukan penghitungan Angka Kreditnya.

Sedangkan sasaran dari Diklat Penghitungan Angka Kredit (PAK) Kependidikan Tahun 2020 adalah terwujudnya ketersediaan guru

SMA/SMK guru-guru yang profesional, bermartabat dan sejahtera dalam menunjang peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang memahami kebijakan dan penyusunan angka kreditnya.

Diklat Penghitungan Angka Kredit (PAK) Kependidikan Tahun 2020 ini telah di ikuti oleh 20 (dua puluh) orang peserta Guru SMA/SMK di lingkungan Pemerintah Aceh.

Gambar 1.2
Foto Dokumentasi Pembukaan Diklat Penghitungan Angka Kredit (PAK) Kependidikan Tahun 2020

Indikator : Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis inti

Pada tahun 2020 ada 3 kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh bidang Sertifikasi Kompetensi Teknis Inti yaitu ;

1. Diklat Manajemen Pengelolaan Arsip Dinamis
2. Bimbingan Teknis Pengelolaan Anggaran Untuk PPTK Tahun 2020
3. Pembekalan dan Uji Kompetensi Arsiparis

Gambar 1.3
Diklat Manajemen Pengelolaan Arsip Dinamis

Gambar 1.4
Bimbingan Teknis Pengelolaan Anggaran Untuk PPTK Tahun 2020

Gambar 1.5
Pembekalan dan Uji Kompetensi Arsiparis

Indikator: Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis penjenjangan structural

I. i. Pengiriman Peserta Pelatihan Administrator Tahun 2020

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan daya saing serta kinerja dijajaran birokrasi, Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh telah melaksanakan kegiatan Diklat Kepemimpinan Administrator bagi para pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Aceh.

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Administrator merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS. Dalam peraturan pemerintah ini telah ditetapkan bahwa PNS yang telah duduk dalam jabatan struktural esselon III dituntut untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan Administrator. Adapun peraturan teknis penyelenggara Diklat Kepemimpinan Administrator di atur dalam Peraturan Kepala lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III.

Tujuan Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Administrator adalah membentuk kompetensi kepemimpinan visioner yaitu kemampuan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan strategis untuk menangani penetapan visi atau arah kebijakan yang tepat. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas dari kegiatan Diklat Kepemimpinan Administrator Tahun 2020 yang telah dilaksanakan.

Pada tahun 2020 sekitar Maret di Indonesia terjadinya pandemic Covid 19 termasuk juga Aceh. Hal ini berlanjut terus hingga akhir tahun. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan. Kondisi covid 19 mengakibatkan terjadinya recofusing anggaran kegiatan untuk kebutuhan dana penangganan covid 19. Anggaran yang sudah direncanakan untuk kegiatan dialihkan untuk kebutuhan covid 19, sehingga untuk tahun ini hanya dapat mengirimkan 3 (tiga) orang peserta diklat administrator ke Puslatbang Khan Aceh.

Gambar 1.6

Pengiriman Peserta Pelatihan Administrator Tahun 2020

Indikator : Jumlah ASN yang mengikuti diklat prajabatan

i. Rapat Koordinasi Evaluasi dan Penyusunan Program Pelatihan Dasar (LATSAR), Pelatihan Kepemimpinan Tahun 2021

Sehubungan peningkatan kasus Infeksi Coronavirus Disease (Infeksi COVID-19), Kementerian Kesehatan telah menetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah. Bahkan World Health Organization (WHO) telah menyatakan sebagai Pandemic pada tanggal 11 Maret 2020, sehingga diperlukan antisipasi dampaknya. Terkait dengan penangan wabah virus Corona tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 13 A/2020 tentang Perpanjangan

Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi NegaraNomor : 7/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19) dalam Penyelenggaraan Pelatihan dan Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 8/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19) dalam Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS dan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon PNS, serta surat edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia No. 23/ K.1/HKM.02.3/ 2020 tentang Panduan Teknis Penyusunan Perencanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penyusunan Skenario Pembelajaran, Serta Kehadiran dan Partisipasi dalam Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid 19), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh perlu mengadakan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Penyusunan Program Pelatihan Dasar dan Pelatihan Kepemimpinan Tahun 2021 dengan stakeholder terkait di Kabupaten/Kota Se Aceh, dalam penyeragaman serta menyatukan visi, dan misi penyelenggaraan pelatihan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

Untuk melakukan Koordinasi Evaluasi dan Penyusunan Program Pelatihan Dasar dan Pelatihan Kepemimpinan Tahun 2020 yang telah dikembangkan dan disempurnakan dalam pencegahan Penyebaran Covid -19, menyusun rencana program kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil pola kemitraan tahun 2021, serta menyamakan persepsi dan membangun sinergi, harmonisasi dan

komitmen para stakeholders dalam menyelenggarakan diklat yang sesuai dengan standar protokol kesehatan Covid-19 yang ditetapkan.

Peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi dan Penyusunan Program Pelatihan Dasar dan Pelatihan Kepemimpinan Tahun 2020 berasal dari para Kepala Badan dan Kepala Bidang di lingkungan BKPSDM Kabupaten/Kota Se Aceh, dan BPSDM Aceh sebanyak 55 (lima puluh lima) orang peserta, terdiri atas :

1. Kepala BKPSDM Se Aceh sebanyak 23 orang;
2. Kepala Bidang Diklat Se Aceh Sebanyak 23 orang;
3. Widyaiswara BPSDM Aceh sebanyak 5 orang;
4. Pejabat BKA Aceh sebanyak 2 orang;
5. Kasubbid BPSDM Aceh sebanyak 2 orang.

Gambar 1.7
Rapat Koordinasi Evaluasi dan Penyusunan Program Pelatihan Dasar (LATSAR), Pelatihan Kepemimpinan Tahun 2021

2.2.1.1. Indikator VII : Jumlah pemberian bantuan tugas belajar dan izin belajar bagi ASN

Ditahun 2020 BPSDM memberikan bantuan tugas belajar dan izin belajar bagi ASN yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi. Bantuan diberikan bagi PNS yang ingin melanjutkan pendidikannya baik ditingkat D3, D4, S1, S2, dan S3 baik di dalam maupun luar negeri, dengan detil sebagai berikut.

Tabel 3.4

PNS PENERIMA BEASISWA TUGAS BELAJAR

TAHUN 2019

No.	Jenjang Pendidikan	Program			Status		Jumlah
		Dalam Negeri		Luar Negeri	Mahasiswa Baru	Mahasiswa Lanjutan	
		Dalam Daerah	Luar Daerah				
1.	S1		√		1	2	3
2.	S2	√	√	√	6	10	16
3.	Program Dokter Spesialis		√			3	3
4.	Program Dokter	√				1	1

	Spesialis						
5.	S3	√	√	√	3	11	14
	Jumlah				**10**	**27**	**37**

Indikator kegiatan kegiatan ini dilihat dari banyaknya jumlah ASN yang mendapat bantuan untuk tugas belajar dan izin belajar. Dimana sebanyak 37 orang yang orang menerima bantuan untuk melaksanakan tugas belajar dan 277 orang yang mendapatkan izin belajar atau total keseluruhan sebanyak 314 ASN. Jumlah ini melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 80% pada perjanjian kinerja 2020. Hal ini disebabkan bantuan yang diberikan bukan hanya terbatas pada biaya yang diberikan namun juga bantuan dalam proses pemberian izin atau pembuatan SK. Sehingga realisasi kegiatan menjadi melebihi target yang ditetapkan.

3.2.2 Sasaran 2 : Meningkatkan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Non Aparatur

Sasaran strategis ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia tidak hanya bagi aparatur namun juga bagi non aparatur atau bagi masyarakat Aceh secara keseluruhan. Diperlukan suatu langkah yang terencana dan sistematis serta efektif dalam pengembangan sumber daya manusia aceh. Sehingga bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat tepat sasaran dan efektif membangun sumber daya manusia aceh. Pengembangan kapasitas SDM merupakan salah satu unsur penting dalam membangun sumber daya manusia Aceh sehingga putra-putri Aceh memiliki kompetensi yang tinggi dan berdaya saing baik ditingkat nasional maupun international. Fokus pengembangan SDM ini terletak pada peningkatan kemampuan masyarakat aceh untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi baik terutama pemberian bantuan

untuk untuk pendidikan baik dijenjang Diploma, maupun Strata 1,2 dan 3.

Tolak ukur capaian sasaran ini terdiri dari 1 indikator yaitu; jumlah putra/putri Aceh yang mendapat bantuan beasiswa sebagaimana yang terdapat pada tabel 3.3 di atas.

Dari perhitungan pada table 3.3 di atas, dapat kita lihat bahwa target pada indikator ini tercapai. Dimana 1376 orang dari jumlah yang ditargetkan sebesar 1430 yang menerima bantuan biaya pendidikan dari BPSDM. Hal ini disebabkan karena para penerima beasiswa tidak mampu melengkapi berkas sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Pergub Aceh Nomor 58 Tahun 2017 tentang Beasiswa Pemerintah Aceh yang mengatur regulasi pemberian beasiswa. Detil penerima beasiswa dapat kita lihat sebagai berikut:

Tabel 3.5
PENERIMA BEASISWA PEMERINTAH ACEH
NON APARATUR DALAM DAN LUAR NEGERI
TAHUN 2020

No.	Jenjang Pendidikan	Jenjang Pendidikan								Jumlah
		Non Gelar	D1	D3	D4	S1	S2	S3	Sps	
I	**Dalam Negeri**									
1.	Aceh Carong bagi Masyarakat Miskin Kerjasama PTN- PTS Se-Aceh					686				686
2.	Afirmasi Dikti 3T					20				20
3.	Agraria		40							40
4.	Jalur Pengembangan Daerah (JPD)					65				65
5.	Aceh Carong Bagi Masyarakat Miskin Usulan Pemerintah Kab/Kota			310	7					317
6.	Dokter Spesialis/ Sub Spesialis								35	35
7.	Prestasi					49	3			52
8.	Penguatan Dosen PTN-PTS							32		32

9.	Split – Site Unsyiah Luar Negeri							10		10
10	Reguler						13	21		34
	Total		**40**	**310**	**7**	**820**	**16**	**63**	**35**	**1291**
II	**Luar Negeri**									
1.	Kerjasama Pemerintah Aceh dengan DAAD Jerman						16	3		19
2.	Prestasi					3				3
3.	Tahfiz					40	10			50
4.	Reguler							13		13
	Jumlah Penerima Beasiswa Luar Negeri	**-**	**-**	**-**	**-**	**43**	**26**	**16**	**-**	**85**
	Jumlah Keseluruhan Penerima Beasiswa non Aparatur		**40**	**310**	**7**	**863**	**42**	**79**	**35**	**1376**

3.2.3. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengukuran capaian indikator kinerja utama (IKU) dilakukan dengan membandingkan antara indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dengan hasil pengukuran kinerja tahun 2020. Hal ini terangkum dalam tabel 3.6 sebagai berikut ini :

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Formula perhitungan	Pencapaian %
1	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai eselon	Persentase Jumlah pejabat structural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan/ Jumlah Pejabat structural yang wajib mengikuti diklat kepemimpinan	52%
2	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan minimal 20 JP pertahun	Persentase Jumlah peserta yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan minimal 20 JP/25% Jumlah ASN x100%	
3	Persentase tugas ASN yang mengambil tugas belajar sesuai	Persentase Jumlah	80.5%

	kebutuhan instansi	ASN yang mengambil tugas belajar/Jumlah Kebutuhan tenaga Kader PNSx100%	
4	Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat prajabatan	Persentase Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan/Jumlah CPNSx100%	91.6%
5	Persentase mahasiswa Aceh yang menerima beasiswa	Persentase Jumlah penerima beasiswa dibandingkan seluruh orang yang wajib menerima beasiswa	96.2%
	Rata-rata		**80%**

Tabel 3.6 tersebut menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh pada tahun 2020 dapat dikategorikan tinggi (80%), terutama jika dilihat dari Persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai eselon dan memiliki sertifikasi pendidikan dan pelatihan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.

Nilai capaian yang sangat baik tersebut menggambarkan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh telah mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Penyelenggaraan

pengembangan kompetensi dan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja 2020 dengan Tahun Lalu Sebelumnya

Untuk melihat pencapaian kinerja tahun 2020, maka perlu dilakukan perbandingan dengan beberapa tahun terakhir agar dapat dilihat apakah ada penurunan atau peningkatan pada program/kegiatan yang dijalankan. Lebih jelasnya dapat kita lihat pada penjelasan berikut ini:

Sasaran I : Meningkatnya kualitas aparatur

Indikator keberhasilan dari sasaran ini ialah terpenuhinya hak-hak Aparatur Sipil Negara dalam mengikuti Diklat Struktural, Diklat Teknis, Diklat Teknis Inti, Diklat Fungsional dan pemberian Tugas Belajar sehingga tercapai pengembangan kompetensi seperti yang diharapkan. Adapun indikator yang telah ditetapkan dan perbandingannya dari tahun ke tahun ialah sebagai berikut :

Tabel 3.7

Realisasi Kinerja Sasaran I Tahun Lalu Dan Tahun Berjalan

Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Aparatur				
Indikator Kinerja	**2019**		**2020**	
	Target	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**
a. Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai Eselon	210 orang	147 orang	21 orang	11 orang

b. Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan minimal 20 JP per tahun	780 0rang	681 orang		
c. Jumlah ASN yang mengambil tugas belajar dan izin belajar sesuai kebutuhan instansi	201 orang	299 orang	390 Orang	314 Orang
d. Persentase CPNS yang telah mengikuti diklat prajabatan	183 Orang	169 Orang	60 Orang	55 Orang

Tabel 3.5 di atas membandingkan antara data tahun ini dan data tahun sebelumnya sesuai dengan tahun rencana strategis BPSDM 2019-2020, dimana tahun 2019 ialah tahun pertama dalam pencapaian rencana kerja jangka menengah BPSDM 2019-2020. Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun sebelumnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh melaksanakan diklat kepemimpinan kepada eselon dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan tahun ini, dikarenakan tahun ini terdapat Wabah Covid-19

Sasaran II : Meningkatnya kualitas sumber daya non aparatur

Indikator keberhasilan dari sasaran ini ialah terpenuhinya hak-hak masyarakat Aceh dalam penerimaan beasiswa yang lulus tepat waktu guna mendukung salah satu program Pemerintah Aceh yaitu Aceh *Carong*. Adapun indikator yang telah ditetapkan dan perbandingannya dari tahun ke tahun ialah sebagai berikut :

Tabel 3.8

Realisasi Kinerja Sasaran II Tahun lalu dan Tahun berjalan

Indikator Kinerja	2019		2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
a. Jumlah mahasiswa Aceh penerima beasiswa	1.608	1.031	1430	1376

Berdasarkan tabel 3.8 di atas membandingkan antara data tahun ini dan data tahun sebelumnya sesuai dengan tahun rencana strategis BPSDM 201-2020, dimana tahun 2020 ialah tahun pertama dalam pencapaian rencana kerja jangka menengah BPSDM 2019-2020. Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh memberikan beasiswa kepada 1031 mahasiswa Aceh, namun pada tahun 2020 jumlah tersebut bertambah sebesar 32.1%.

3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Jangka menengah BPSDM Aceh

Tabel 3.9

Target dan Realisasi Jangka Menengah BPSDM Aceh

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran dan Realisasi									
			2018		2019		2020		2021		2022	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R

1.	Menciptakan Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dalam memberikan pelayanan publik	a. Peningkatan Kualitas kelembagaan diklat b. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Diklat 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat	20 % 20 % 75 %	91.3 % 112.8% 87.4 %	40% 35% 78%	- - -	55 % 45 % 84 %	- - -	67 % 60 % 87 %	- - -	87 % 75 % 89 %	- - -
		2. Peningkatan Kerjasama jejaring kerja. 3. Pengelolaan Sistem Informasi kediklatan	30 % 45 % 33 %	100 % - 81%	35% 50% 34%	- - -	44 % 52 % 38 %	- - -	48 % 55 % 40 %	- - -	50 % 60 % 45 %	- - -

		4. Konsisten terhadap sertifikasi kompetensi										
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Non Aparatur yang handal dan memiliki daya saing tinggi	Penyaluran beasiswa masyarakat Aceh tepat sasaran	25 %	64%	27%	-	33 %	-	35 %	-	40 %	-

Secara umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh cukup mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang telah ditetapkan selama tahun 2018. Dapat terlihat pada tabel 3.9 diatas bahwa pada tahun 2018 semua sasaran mampu dicapai melebihi target yang ditetapkan. Namun demikian pada tahun 2018 terdapat satu sasaran yang belum mencapai terlaksana yaitu pengelolaan sistem informasi kediklatan. Dimana kegiatan ini belum dapat terealisasi jika dilihat dari program/kegiatan maupun anggaran.

3.5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternatif Solusi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh berhasil melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2019. Jika dilihat dari realisasi keuangan Dari 30 kegiatan, ada beberapa 3 kegiatan yang melebihi target 100%, 1 kegiatan yang mencapai target 100%, 24 kegiatan yang mencapai target lebih dari 65%, 3 kegiatan yang mencapai target lebih dari 50% serta dan ada 3 kegiatan yang mencapai target kurang dari 50%, untuk lebih jelasnya dapat di lihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 3.10

Kelompok Capaian Kinerja BPSDM Aceh 2019

NO	Nilai Capaian	Jumlah
1	>100%	3 kegiatan
2	100%	1 kegiatan
3.	65%-99%	24 kegiatan
4.	50%-64%	2 kegiatan
5.	<50%	0 kegiatan
	Jumlah	30 Kegiatan

Kegiatan yang melebihi target dikarenakan beberapa faktor yaitu :

1. Rendahnya target yang ditetapkan seperti pada kegiatan Diklat Teknis Umum dan Diklat profesionalisme. Sehingga dana yang tersedia dari anggaran tersebut berlebih dan dapat dimanfaatkan untuk bantuan biaya diklat bagi ASN baik struktural maupun fungsional.
2. Adanaya kegiatan administrasi yang tidak membutuhkan anggaran dan tidak dapat diprediksi. Seperti pada pemberian izin belajar, banyaknya permintaan izin belajar dari ASN yang membutuhkan, sehingga BPSDM dapat membantu dalam proses pengeluaran SK tanpa memberikan bantuan biaya.

Adapun kegiatan yang tidak mencapai sasaran atau memiliki capaian rendah dikarenkan beberapa faktor yaitu:

1. Disesuaikan dengan kebutuhan yang memang rendah seperti pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
2. Terlambatnya pengesahan anggaran pada tahun 2019, sehingga satu kegiatan tidak dapat dilaksanakan diakibatkan para peserta diklat telah memilih untuk mengikuti diklat yang diinginkan di daerah lain seperti pada kegiatan diklat Fungsional P2UPD.

3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh memiliki sumber daya yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsinya baik dalam manajemen penyelenggaran pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Struktural maupun Fungsional, penyaluran beasiswa non Aparatur di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Diantara sumber daya yang dimiliki antara lain sumber daya manusia yang terdiri dari; 112 Pegawai Negeri Struktural yang memberikan pelayanan administrasi kepada pegawai maupun masyarakat yang membutuhkan. Selain itu ditambah dengan 75 orang pegawai non PNS. Tenaga Pengajar yang tersedia di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh tersedia sebanyak 23 orang Widyaiswara yang datang dari latar belakang pemerintahan dan disiplin ilmu berbeda. Tenaga pengajar Widyaiswara ini difungsikan dalam Diklat Prajabatan Golongan I & II, Diklat Kepemimpinan serta sebagai Narasumber bagi diklat-diklat fungsional di daerah. Namun demikian, untuk pelaksanaan diklat ditingkat Provinsi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh masih membutuhkan tenaga pengajar dari LAN-RI, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dan beberapa instansi terkait lainnya. Hal ini dikarenakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh masih membutuhkan sosialisasi maupun informasi mengenai peraturan terbaru maupun aplikasi dari peraturan lama.

Gambar 1.8
Widyaiswara mengikuti diklat TOF di salah satu ruang kelas di BPSDM Aceh

Dalam hal pelaksanaan diklat-diklat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh memberdayakan fasilitas dan prasarana yang dimiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh yang mencakup ; Ruang Belajar, Ruang Serbaguna, Asrama diklat, *Guest*

House, Ruang Makan, Perpustakaan, dan Laboratorium Bahasa. Khusus untuk kegiatan yang berskala besar dan membutuhkan fasilitas lebih maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh bekerja sama dengan pihak manajemen hotel untuk memesan Aula dan fasilitas yang mereka sediakan.

Gambar 1.9
Gedung Auditorium BPSDM Aceh

Gambar 1.10
Ruang kelas BPSDM Aceh

Gambar 1.11
Gedung Asrama BPSDM Aceh

Selain tenaga pengajar, fasilitas sarana dan prasarana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh juga memiliki sarana yang berbasis teknologi informatika yaitu *Website* Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh yang merupakan Sistem Informasi Diklat (SIDA). *Website* ini digunakan untuk memudahkan penyampaian informasi kepada Pegawai Negeri Sipil terkait dengan peraturan, data kediklatan.

B. Realisasi Keuangan

Dengan rincian Realisasi Tahun 2020 sebagai berikut:

1. **Belanja Tidak Langsung** sebesar **Rp. 15,420,420,840.00-**

2. **Belanja langsung** sebesar **Rp. 73,485,999,232.00** anggaran ini digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:
   a) Program Pendidikan Kedinasan sebesar Rp. 654,782,927.00-
   b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. -
   c) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp 5,886,345,319.00-
   d) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 7,018,133,509.00-
   e) Program Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur sebesar Rp. 1,204,049,182.00-
   f) Program Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh Rp. 58,722,688,295.00-

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh Tahun 2020 yang telah selesai disusun menunjukkan bagaimana kualitas kinerja seluruh elemen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh. Seluruh kerja keras yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Aceh melalui program dan kegiatan serta alur proses manajemen yang baik, mulai dari perencanaan yang matang hingga evaluasi yang efektif. Pencapaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh pada tahun 2020 diukur dengan 2 (dua) Sasaran Strategis. Seluruh sasaran strategis yang telah diupayakan selama tahun 2020 ini dapat dicapai dengan baik. Dari perhitungan rata-rata atau kumulatif, capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh tahun 2020.

Dengan hasil tersebut diatas, kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh pada tahun 2020 dapat dinilai “berhasil”. Hal ini tentunya tidak hanya melihat pencapaian angka semata, namun ini sebuah hasil karya nyata bahwa keseriusan seluruh elemen Badan Pengembangan sumber Daya Manusia Aceh dalam mengemban amanat telah ditunjukkan dengan sungguh-sungguh. Namun demikian, semua pencapaian baik tersebut tentunya masih membutuhkan upaya perbaikan dan pembenahan di segala lini dan bidang untuk mencapai kinerja yang optimal seperti yang diharapkan.

Hal ini tak dapat dipungkiri, sebab keberadaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh yang sangat strategis mempunyai peran dalam pengelolaan sumber daya aparatur Pemerintah Aceh sehingga dituntut untuk berkinerja secara lebih baik sesuai dengan alur proses manajemen kinerja. Dan dalam rangka mewujudkan

reformasi birokrasi yang telah di cita-citakan saat ini, perbaikan kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh secara kelembagaan dapat mendukung hal tersebut dan untuk selanjutnya dapat menjadikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh sebagai lembaga pengelola aparatur yang profesional dan unggul.

4.2 Rekomendasi dan Saran

Memperhatikan beberapa permasalahan yang selalu dihadapi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh setiap tahunnya, terutama pada tahun 2020, beberapa saran perbaikan yang bisa menjadi solusi adalah

1. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi Pembina Kediklatan di Pusat dan Daerah.
2. Meningkatkan monitoring antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di tingkat Kabupaten/Kota.
3. Meningkatkan koordinasi antar instansi yang terkait dengan anggaran sehinga penetapan pagu anggaran untuk tahun selanjutnya dapat diusahakan sesuai kebutuhan.
4. Meningkatkan kualitas Widyaiswara atau penyelenggara diklat dengan memfasilitasi keikutsertaan mereka dalam diklat-diklat yang diadakan oleh pemerintah pusat terkait dengan Implementasi Undang-Undang ASN maupun pelaksanaan diklat-diklat baru.
5. Memaksimalkan penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana serta sumber daya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh agar tercapainya efisiensi kinerja dan anggaran sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara.

6. Meningkatkan program kegiatan yang menunjang pelayanan terhadap pegawai negeri sipil maupun mayarakat terutama yang berbasis teknologi.
7. Penyaluran beasiswa yang sesuai dengan *grand* design dan Pergub 58 tahun 2017 tentang pemberian beasiswa, sehingga beasiswa yang diberikan lebih efektif dan transparant serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh dan arah kebijakan pemerintah Aceh.
8. Peningkatan informasi dan data terutama untuk informasi pelayanan kediklatan berbasis internet. Sehingga terpenuhinya kebutuhan akan data mengenai kediklatan serta lebih yang berintegrasi bagi seluruh pengelola dan user kediklatan di Aceh.